

Analisis Implementasi Kebijakan Preservasi Koleksi Kuno dan Langka di Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian

Muhammad Syazarwan

Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
Email: muhammad22123@mail.unpad.ac.id

Ute Lies Siti Khadijah

Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
Email: ute.lies@unpad.ac.id

Yunus Winoto

Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
Email: yunus.winoto@unpad.ac.id

Received: 15 Juni 2026

Revised: 20 Juni 2026

Accepted: 28 Juni 2026

DOI: 10.24036/ib.v7i1.710

Abstract

The Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian (BB Pustaka) holds more than 11,000 antiquarian collection titles with high historical and scientific value, making preservation policy implementation a critical institutional responsibility. This study aims to analyze the implementation of preservation policies for ancient and rare collections at BB Pustaka, examine the effectiveness of operational guidelines used, and identify managerial constraints in preservation activities based on IFLA preservation principles. This research employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and literature study. Informants were selected using purposive sampling consisting of senior librarians, unit heads, and technical preservation staff. Data validity was tested through source triangulation and analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that preservation policy at BB Pustaka has a normative basis derived from Ministry of Agriculture regulations, with preservation activities prioritized on Indonesian collections. However, the existing SOP has not been optimally utilized as a work guideline due to inadequate socialization. Preservation practices largely rely on tacit knowledge transmitted informally among librarians. A digital flipbook containing detailed technical procedures was found, but it has not been formally institutionalized as an official policy document. BB Pustaka has sufficient institutional foundations and technical capacity for preservation, but requires strengthening in procedure standardization, policy documentation, and institutionalization of preservation knowledge to ensure more consistent and sustainable collection conservation.

Keywords: Preservation policy; antiquariat and rare collections; tacit knowledge; standard operating procedure; IFLA

Abstrak

Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian (BB Pustaka) memiliki lebih dari 11.000 koleksi benda-benda purbakala dengan nilai sejarah dan ilmiah yang tinggi, sehingga implementasi kebijakan pelestarian menjadi tanggung jawab institusional yang sangat penting. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelestarian koleksi benda-benda purbakala dan langka di BB Pustaka, menguji efektivitas pedoman operasional yang digunakan, dan mengidentifikasi kendala manajerial dalam kegiatan pelestarian berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian IFLA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan dipilih menggunakan purposive sampling yang terdiri dari pustakawan senior, kepala unit, dan staf teknis pelestarian. Validitas data diuji

melalui triangulasi sumber dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian di BB Pustaka memiliki dasar normatif yang berasal dari peraturan Kementerian Pertanian, dengan kegiatan pelestarian diprioritaskan pada koleksi Indonesiana. Namun, SOP yang ada belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pedoman kerja karena sosialisasi yang kurang memadai. Praktik pelestarian sebagian besar bergantung pada pengetahuan tacit yang ditransmisikan secara informal di antara pustakawan. Sebuah buku digital berisi prosedur teknis terperinci telah ditemukan, tetapi belum diinstitusionalisasi secara formal sebagai dokumen kebijakan resmi. BB Pustaka memiliki fondasi kelembagaan dan kapasitas teknis yang memadai untuk pelestarian, tetapi membutuhkan penguatan dalam standarisasi prosedur, dokumentasi kebijakan, dan institusionalisasi pengetahuan pelestarian untuk memastikan konservasi koleksi yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan pelestarian; koleksi barang antik dan langka; pengetahuan tacit; prosedur operasi standar; IFLA

PENDAHULUAN

Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian (BB Pustaka) merupakan salah satu perpustakaan khusus tertua di Indonesia yang berperan strategis dalam pengelolaan, pelestarian, dan penyediaan informasi di bidang pertanian dan biologi. Sejak berdiri pada abad ke-19, lembaga ini telah menghimpun lebih dari 11.000 judul koleksi antikuariat, termasuk karya monumental seperti *Historiae Generalis Plantarvm-Pars Altera* (1586) dan *Herbarium Amboinense* (1741). Koleksi tersebut tidak hanya bernilai bibliografis, tetapi juga merupakan sumber informasi autentik mengenai sejarah pertanian, eksplorasi flora tropis, dan perkembangan ilmu botani

di Nusantara yang menjadi bagian dari warisan dokumenter bangsa.

Dewandaru (2023) menegaskan bahwa koleksi langka memuat pengetahuan budaya, adat, dan tradisi masyarakat yang bernilai tinggi dan akan hilang jika tidak dilestarikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, naskah dan dokumen kuno merupakaninggalan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Lebih jauh, Lee et al. (2002) menyatakan bahwa pelestarian bahan langka tidak hanya penting untuk menjaga pengetahuan historis, tetapi juga untuk mendukung komunikasi ilmiah global dan riset interdisipliner melalui akses digital. Dengan demikian, preservasi koleksi kuno dan langka

menjadi tanggung jawab institusional yang strategis, bukan sekadar tindakan teknis perawatan bahan pustaka.

Namun demikian, koleksi kuno dan langka menghadapi berbagai ancaman kerusakan, baik dari faktor internal seperti keasaman kertas dan usia dokumen, maupun faktor eksternal seperti kelembapan udara, paparan cahaya, gangguan mikroorganisme, dan kelalaian manusia (Fatmawati, 2018; Endriawan dkk., 2025). Dalam konteks negara tropis seperti Indonesia, tingkat kelembapan yang relatif tinggi mempercepat degradasi bahan pustaka sehingga ancaman kerusakan koleksi menjadi lebih serius. Kondisi ini menuntut adanya sistem preservasi yang terstruktur, konsisten, dan berbasis kebijakan yang kuat.

Landasan teoretis penelitian ini merujuk pada prinsip preservasi yang dikembangkan oleh International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Adcock (2000) mendefinisikan preservasi sebagai konsep multidimensional yang mencakup seluruh pertimbangan

manajerial dan finansial, termasuk kebijakan, sumber daya manusia, sarana penyimpanan, pengendalian lingkungan, serta metode pelestarian koleksi secara terintegrasi. Sejalan dengan itu, (Harvey dalam Ibrahim, 2016) menegaskan bahwa kebijakan preservasi merupakan isu manajemen yang memerlukan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* secara sistematis. Kebijakan preservasi dengan demikian bukan sekadar dokumen formal, melainkan instrumen pengelolaan yang menentukan arah, prioritas, dan standar kerja dalam kegiatan pelestarian koleksi secara berkelanjutan.

Salah satu instrumen penting dalam implementasi kebijakan preservasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). Ariyanti dkk. (2025) menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara SOP dan ketersediaan sarana-prasarana akan menghambat efektivitas pelaksanaan preservasi. Namun dalam praktiknya, keberadaan kebijakan formal dan SOP tidak selalu diikuti implementasi yang optimal. Banyak lembaga informasi masih

mengandalkan *tacit knowledge*, yakni pengetahuan praktis yang diperoleh dari pengalaman kerja dan ditransmisikan secara informal antar pustakawan (Lolytasari, 2017). Ketergantungan ini berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan dan hilangnya pengetahuan preservasi saat terjadi pergantian staf (Harvey dalam Astrina et al., 2024).

Kajian terdahulu mengenai topik ini menunjukkan beberapa temuan penting. Martin (2024) menemukan bahwa implementasi kebijakan preservasi di Dinas Perpustakaan Tanah Datar terkendala keterbatasan tenaga ahli dan anggaran. Dila (2020) menunjukkan bahwa ketiadaan SOP yang disahkan secara formal menghambat pelaksanaan preservasi yang sistematis. Sementara penelitian di lingkungan BB Pustaka sendiri masih terbatas pada aspek teknis, seperti konservasi fisik buku antikuariat (Nuraini, 2017) dan alih media koleksi digital (Safanawati & Samson, 2020). Pembahasan mengenai implementasi kebijakan preservasi dari perspektif manajemen kelembagaan di BB Pustaka

masih relatif terbatas, sehingga terdapat *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) karena tidak hanya mengkaji tindakan teknis preservasi, tetapi juga menganalisis bagaimana kebijakan preservasi diterapkan dalam kerangka manajemen kelembagaan sesuai prinsip IFLA, termasuk hubungan antara kebijakan formal, SOP, praktik organisasi, dan transmisi pengetahuan preservasi di BB Pustaka.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan: "*Bagaimana implementasi kebijakan preservasi koleksi kuno dan langka di Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian dijalankan dalam kerangka manajerial sesuai standar IFLA?*" Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan preservasi di BB Pustaka, menelaah efektivitas pedoman operasional yang digunakan, serta mengidentifikasi kendala manajerial dalam kegiatan preservasi koleksi kuno dan langka.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berupaya menjawab pertanyaan "*how and why*" mengenai implementasi kebijakan preservasi koleksi kuno dan langka di lingkungan BB Pustaka dalam konteks kehidupan nyata organisasi (Yin, 2015). BB Pustaka dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik khusus sebagai perpustakaan pemerintah yang menyimpan koleksi antikuariat di bidang pertanian dan biologi, sehingga relevan untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian dilaksanakan di Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Bogor, pada bulan Februari 2026. Peneliti hadir langsung di lokasi penelitian untuk melakukan wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran dokumen guna memperoleh

pemahaman yang komprehensif mengenai praktik preservasi koleksi yang berlangsung di lingkungan lembaga tersebut.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung dalam kegiatan preservasi koleksi (Rahmadi, 2011). Informan dalam penelitian ini terdiri atas Ketua Kelompok Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Perpustakaan, pustakawan pengelola koleksi kuno dan langka, serta staf teknis preservasi yang memiliki pengalaman dalam kegiatan preservasi di BB Pustaka.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai kebijakan preservasi, praktik pelestarian koleksi, penggunaan SOP, serta kendala yang dihadapi dalam kegiatan preservasi. Observasi

dilakukan terhadap kondisi ruang penyimpanan koleksi, peralatan preservasi, dan praktik kerja pustakawan dalam menangani koleksi. Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dokumen kebijakan, SOP, laporan kegiatan, serta dokumen teknis preservasi yang tersedia di lingkungan lembaga. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah dan referensi terkait preservasi koleksi perpustakaan.

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memeriksa konsistensi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Melalui proses analisis tersebut, data penelitian disusun dan ditafsirkan secara sistematis sehingga dapat menjelaskan implementasi kebijakan preservasi koleksi kuno dan langka di BB Pustaka secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Normatif Kebijakan Preservasi

Kebijakan preservasi koleksi di Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga sebagai perpustakaan khusus di lingkungan instansi pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kegiatan preservasi koleksi dilaksanakan sebagai implementasi dari kebijakan yang berasal dari regulasi di tingkat Kementerian Pertanian. Kebijakan tersebut kemudian diturunkan ke dalam tugas dan fungsi lembaga yang mengatur kegiatan pelestarian koleksi bahan perpustakaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Widharyono selaku Ketua Kelompok Perpustakaan dan Literasi Pertanian:

".... memang dari Peraturan Menteri ada di dalam tugas dan fungsi BB Pustaka ini ada yang namanya preservasi koleksi bahan perpustakaan. Nah, itu meng-cascading atau men-deliver dari aturan yang ada di atasan atau di Kementerian Pertanian untuk kita tindak lanjuti yaitu adanya naskah kebijakan

pengembangan koleksi yang di dalamnya salah satu poin yaitu adanya preservasi koleksi." (Wawancara, Widharyono, 18 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan preservasi di BB Pustaka memiliki dasar normatif yang bersumber dari regulasi di tingkat kementerian. Dengan kata lain, kegiatan preservasi koleksi tidak hanya dilaksanakan sebagai inisiatif internal lembaga, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan mandat kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan koleksi bahan perpustakaan yang memiliki nilai informasi dan historis penting. Sebagai perpustakaan khusus yang menyimpan berbagai literatur di bidang pertanian dan biologi, lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa koleksi yang dimilikinya tetap terjaga kondisinya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh para pengguna.

Temuan ini sejalan dengan pandangan IFLA yang menempatkan preservasi sebagai bagian dari fungsi manajerial

lembaga informasi. Adcock (2000) menjelaskan bahwa preservasi merupakan istilah yang mencakup seluruh pertimbangan manajerial dan finansial, termasuk kebijakan, sumber daya manusia, metode kerja, serta teknik yang digunakan dalam menjaga koleksi perpustakaan dan informasi yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, implementasi preservasi di BB Pustaka menunjukkan bahwa kegiatan pelestarian koleksi telah dipahami sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan perpustakaan, bukan sekadar aktivitas teknis dalam perawatan bahan pustaka.

2. Prioritas Preservasi terhadap Koleksi Indonesiana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan preservasi di BB Pustaka memiliki prioritas tertentu dalam menentukan koleksi yang akan dipreservasi. Berdasarkan keterangan informan, dari total koleksi yang dimiliki perpustakaan, upaya preservasi lebih diprioritaskan pada koleksi-koleksi yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Koleksi tersebut oleh

pustakawan di lingkungan lembaga disebut sebagai Koleksi Indonesiana. Dalam konteks ini, Koleksi Indonesiana dipahami sebagai koleksi yang diterbitkan di Indonesia maupun koleksi yang diterbitkan di luar negeri tetapi membahas mengenai Indonesia. Prioritas terhadap Koleksi Indonesiana dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa koleksi-koleksi tersebut memiliki nilai informasi yang penting bagi pengguna perpustakaan, khususnya dalam menyediakan informasi mengenai Indonesia. Oleh karena itu, preservasi terhadap koleksi tersebut dipandang penting agar informasi yang terkandung di dalamnya tetap dapat diakses oleh pemustaka dalam jangka panjang.

Pelaksanaan kegiatan preservasi di BB Pustaka juga berkaitan erat dengan karakteristik koleksi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Koleksi yang tersimpan tidak hanya terdiri dari bahan pustaka terbaru, tetapi juga mencakup berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah tinggi, termasuk koleksi yang berasal dari masa kolonial. Kondisi tersebut menjadikan kegiatan

preservasi sebagai salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan koleksi di lembaga tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Widharyono:

"Ini memang sudah 8 atau 9 tahun yang lalu sudah kita lakukan kegiatan preservasi sesuai dengan kebijakan atau tugas fungsi yang ada di BB Pustaka ini sebagai perpustakaan khusus instansi pemerintah yang tentunya koleksi-koleksinya ini kan tidak hanya koleksi-koleksi up to date tapi koleksi-koleksi yang zaman Belanda." (Wawancara, Widharyono, 18 Februari 2026).

Dalam perspektif IFLA, preservasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh koleksi dalam waktu yang bersamaan karena lembaga memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari aspek tenaga, anggaran, maupun fasilitas preservasi. Oleh sebab itu, lembaga perlu menentukan prioritas koleksi berdasarkan nilai historis, tingkat kelangkaan, kondisi fisik, serta nilai informasi yang terkandung di dalamnya. Prioritas preservasi terhadap Koleksi Indonesiana menunjukkan bahwa BB Pustaka telah

mempertimbangkan aspek kebermanfaatan informasi dan nilai historis koleksi dalam pelaksanaan preservasi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa preservasi tidak hanya berorientasi pada penyelamatan fisik koleksi, tetapi juga pada keberlanjutan akses terhadap informasi yang memiliki nilai penting bagi penelitian dan memori kolektif bangsa.

3. Kesenambungan Praktik Preservasi dan Dinamika Tacit Knowledge

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan preservasi koleksi di BB Pustaka telah dilaksanakan sejak beberapa tahun sebelum adanya penguatan kebijakan dalam bentuk pedoman kerja yang lebih sistematis. Informan menjelaskan bahwa kegiatan preservasi telah berlangsung selama kurang lebih delapan hingga sembilan tahun dan tetap dilakukan secara berkelanjutan meskipun terjadi pergantian pimpinan di lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa praktik preservasi telah menjadi bagian

dari rutinitas kerja dalam pengelolaan koleksi di lingkungan lembaga. Sebagaimana disampaikan oleh Widharyono:

"Sebenarnya kebijakan ini kurang lebih sekitar 8 sampai 9 tahun ya, karena beberapa kali ganti pimpinan itu tetap koleksi-koleksi yang ada ini dilakukan kegiatan preservasi. Dan memang kegiatan preservasi ini sudah berjalan cukup lama dan dibuktikan dengan adanya koleksi yang sudah ter-display yang ada di ruang layanan ini." (Wawancara, Widharyono, 18 Februari 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik preservasi koleksi di BB Pustaka tidak hanya berkembang melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui praktik organisasi yang telah berlangsung secara berkelanjutan dalam pengelolaan koleksi. Dengan kata lain, pelaksanaan preservasi koleksi di lembaga tersebut telah terbentuk sebagai bagian dari kebiasaan kerja yang berkembang dari waktu ke waktu di lingkungan organisasi.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga sebenarnya telah memiliki pedoman kerja yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan preservasi koleksi. Namun demikian, pedoman kerja tersebut belum sepenuhnya memuat petunjuk teknis yang rinci mengenai pelaksanaan kegiatan preservasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mustika selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Perpustakaan:

"Kita sebenarnya sudah ada pedoman kerjanya, tapi belum ngedetail dan belum sesuai dengan standar yang dari Perpusnas itu. Jadi kita melakukan kegiatan preservasi ini masih dari turun-temurun. Seperti pencucian buku itu kita masih melakukan kegiatannya sesuai dengan yang sudah dilakukan sebelumnya." (Wawancara, Mustika, 18 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian praktik preservasi koleksi di BB Pustaka masih sangat dipengaruhi oleh pengalaman kerja pustakawan yang sebelumnya menangani kegiatan preservasi. Dalam

konteks ini, pengetahuan mengenai teknik penanganan koleksi tidak sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk pedoman tertulis yang sistematis, melainkan diperoleh melalui proses pembelajaran informal antar pustakawan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Kondisi ini sejalan dengan konsep *tacit knowledge* yang didefinisikan oleh Lolytasari (2017) sebagai pengetahuan yang bersifat personal, hanya dimiliki oleh satu individu berupa perasaan pribadi, intuisi, pengalaman fisik, dan petunjuk praktis. Praktik preservasi yang berkembang secara turun-temurun menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan teknis preservasi termasuk teknik pencucian buku, *bleaching*, maupun penjilidan ulang lebih banyak dipelajari melalui praktik kerja dibandingkan melalui pedoman formal yang terdokumentasi secara sistematis. Ketergantungan terhadap *tacit knowledge* dapat menimbulkan risiko ketidakkonsistenan praktik preservasi ketika terjadi pergantian staf atau perubahan struktur organisasi, sebagaimana ditekankan oleh Harvey

dalam Astrina et al. (2024) bahwa kebijakan manajemen preservasi yang kuat harus mencakup aspek akuisisi, penyimpanan, hingga kontrol lingkungan yang didukung sistem dokumentasi memadai.

4. Kesenjangan antara SOP Formal dan Implementasi di Lapangan

Mustika menjelaskan bahwa lembaga sebenarnya telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur kegiatan preservasi koleksi. Namun demikian, dokumen tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai pedoman kerja oleh seluruh pustakawan karena belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada staf yang terlibat dalam kegiatan preservasi. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"SOP itu sebenarnya ada, tapi tidak dipakai dan tidak disosialisasikan ke yang lain. Jadi yang menjalankan kegiatan ini sudah dapat ilmunya dari atasannya sebelumnya, jadi mereka sudah paham dan lebih mengikuti cara yang sudah biasa dilakukan."

(Wawancara, Mustika, 18 Februari 2026).

Selain informasi yang diperoleh melalui wawancara, peneliti menemukan adanya dokumen SOP yang diterbitkan oleh Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian pada tahun 2017. Dokumen tersebut secara formal berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan perpustakaan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian koleksi.



Gambar 1 Buku SOP BB Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen SOP tersebut, terdapat 18 prosedur operasional yang mengatur berbagai kegiatan teknis di Bidang Perpustakaan BB Pustaka. Dari keseluruhan prosedur tersebut, hanya dua SOP yang secara langsung berkaitan

dengan kegiatan preservasi koleksi, yaitu Prosedur Penjilidan Bahan Pustaka dan Prosedur Digitasi Koleksi Perpustakaan. Prosedur penjilidan mengatur tindakan perbaikan fisik terhadap koleksi yang mengalami kerusakan pada bagian jilidan agar struktur buku kembali kuat dan dapat digunakan oleh pemustaka. Sementara itu, prosedur digitasi mengatur kegiatan alih media koleksi ke dalam format digital sebagai upaya menjaga keberlanjutan akses terhadap informasi yang terkandung di dalam koleksi tersebut. Keberadaan kedua prosedur tersebut menunjukkan bahwa aspek pelestarian koleksi telah diakomodasi dalam dokumen operasional perpustakaan, meskipun ruang lingkupnya masih terbatas pada tindakan perbaikan fisik koleksi dan alih media.

Sebagian besar prosedur lainnya lebih berfokus pada pengaturan kegiatan operasional perpustakaan seperti layanan informasi, pengelolaan koleksi, pengolahan informasi, serta pengelolaan publikasi ilmiah. Prosedur seperti pengadaan bahan pustaka,

pengolahan bahan pustaka buku, penyimpanan kembali koleksi (*reshelving*), serta *stock opname* berfungsi untuk mendukung pengelolaan koleksi secara administratif dan operasional. Meskipun kegiatan tersebut berkontribusi dalam menjaga keteraturan dan pengendalian koleksi perpustakaan, prosedur-prosedur tersebut tidak secara spesifik mengatur tindakan preservasi terhadap koleksi yang mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai preservasi koleksi dalam dokumen SOP masih terbatas pada beberapa kegiatan tertentu, sementara aspek teknis preservasi lainnya belum tercantum secara rinci dalam dokumen tersebut.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan dokumen formal belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen standardisasi kerja preservasi. Dalam konsep preservasi IFLA, prosedur operasional memiliki fungsi penting dalam menciptakan konsistensi dan kualitas pelaksanaan preservasi. SOP

tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian mutu yang membantu organisasi memastikan bahwa seluruh tindakan preservasi dilakukan sesuai standar profesional. Belum optimalnya pemanfaatan SOP di BB Pustaka menunjukkan bahwa proses standardisasi preservasi masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini sejalan dengan temuan Dila (2020) yang menunjukkan bahwa ketiadaan SOP preservasi yang disahkan secara formal menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan perawatan koleksi secara sistematis. Ariyanti dkk. (2025) juga menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara SOP dan ketersediaan sarana-prasarana akan menghambat efektivitas pelaksanaan preservasi.

5. Inisiatif Dokumentasi Teknis: Flipbook Digital Penanganan Koleksi Antikuariat

Peneliti menemukan adanya sebuah dokumen internal berisi 14 halaman yang menjelaskan secara cukup rinci mengenai prosedur penanganan koleksi antikuariat di

lingkungan BB Pustaka. Dokumen tersebut berbentuk *flipbook* digital yang di dalamnya memuat berbagai tahapan preservasi koleksi, antara lain proses alih media, *bleaching*, laminasi, serta penjilidan ulang (*book binding*). Selain itu, dijelaskan pula tahapan identifikasi kerusakan koleksi, seperti kerusakan fisik, biologis, dan kimia, yang menjadi dasar dalam menentukan jenis tindakan preservasi yang akan dilakukan terhadap suatu koleksi.

Secara khusus, dokumen tersebut memuat prosedur teknis yang relatif rinci dalam pelaksanaan kegiatan konservasi aktif, salah satunya pada proses *bleaching*. Dalam prosedur tersebut dijelaskan komposisi bahan kimia yang digunakan, seperti kalium permanganat, asam oksalat, dan magnesium karbonat, beserta tahapan penggunaannya dalam proses pencucian kertas yang mengalami perubahan warna. Dokumen tersebut bahkan menjelaskan langkah-langkah operasional secara sistematis, mulai dari proses pembongkaran jilidan buku, pengujian kelunturan tinta, proses perendaman kertas pada larutan kimia

tertentu, hingga tahapan pengeringan dokumen pada kondisi suhu dan kelembapan tertentu. Keberadaan prosedur yang cukup rinci ini menunjukkan bahwa secara teknis kegiatan konservasi koleksi di BB Pustaka telah memiliki panduan praktik yang dapat dijadikan acuan oleh pustakawan dalam melaksanakan kegiatan preservasi koleksi.



Gambar 2. *Flipbook* Digital

Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran peneliti, dokumen tersebut tidak ditemukan sebagai bagian dari dokumen kebijakan resmi ataupun buku SOP yang secara formal ditetapkan oleh lembaga. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa dokumen tersebut merupakan inisiatif individu dari salah satu staf yang memiliki pengalaman dalam kegiatan preservasi koleksi, sehingga

keberadaannya lebih bersifat sebagai panduan kerja praktis daripada sebagai kebijakan kelembagaan yang mengikat secara formal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mendokumentasikan prosedur teknis preservasi, proses institusionalisasi pengetahuan tersebut ke dalam bentuk kebijakan atau SOP yang resmi masih belum sepenuhnya terjadi.

Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa praktik preservasi koleksi di BB Pustaka lebih banyak berkembang melalui pengalaman kerja dan inisiatif individu pustakawan daripada melalui sistem kebijakan yang terstruktur secara formal. Dengan kata lain, kegiatan preservasi telah berjalan dan bahkan memiliki prosedur teknis yang relatif rinci, namun belum sepenuhnya didukung oleh kerangka kebijakan kelembagaan yang terdokumentasi secara sistematis. Perspektif IFLA menekankan bahwa keberadaan dokumentasi formal menjadi penting untuk memastikan bahwa pengetahuan preservasi tidak hanya tersimpan pada

individu tertentu, tetapi menjadi bagian dari sistem organisasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Martin (2024) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan preservasi di perpustakaan pemerintah sering terkendala oleh belum tersistematisasinya pengetahuan teknis ke dalam kerangka formal kelembagaan.

Secara keseluruhan, berdasarkan seluruh temuan di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan preservasi di BB Pustaka memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, kebijakan preservasi memiliki dasar normatif yang bersumber dari regulasi di tingkat kementerian sebagai bagian dari tugas dan fungsi lembaga. *Kedua*, implementasi kebijakan preservasi dalam praktiknya banyak dipengaruhi oleh praktik organisasi yang telah berlangsung secara berkelanjutan dalam pengelolaan koleksi. *Ketiga*, sebagian pengetahuan teknis mengenai pelaksanaan preservasi koleksi masih tersimpan dalam bentuk pengetahuan praktis yang dimiliki oleh pustakawan

yang telah lama terlibat dalam kegiatan preservasi dan ditransmisikan secara informal antar pustakawan, sehingga belum sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk pedoman tertulis yang sistematis. Kondisi di BB Pustaka menunjukkan bahwa aspek teknis preservasi telah berkembang cukup baik, tetapi penguatan pada aspek institusionalisasi kebijakan dan standarisasi prosedur masih diperlukan agar preservasi dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi kebijakan preservasi koleksi kuno dan langka di Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian telah dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan fungsi kelembagaan yang bersumber dari regulasi di tingkat Kementerian Pertanian. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui berbagai kegiatan pelestarian koleksi, khususnya terhadap koleksi yang memiliki nilai historis dan informasi penting, seperti Koleksi Indonesiana dan koleksi

kolonial. Pelaksanaan preservasi juga menunjukkan adanya kesinambungan praktik organisasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dalam pengelolaan koleksi kuno dan langka di lingkungan lembaga.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik preservasi tidak hanya berkembang melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui pengalaman kerja pustakawan yang ditransmisikan secara informal antar staf dalam bentuk *tacit knowledge*. Meskipun lembaga telah memiliki SOP dan dokumen teknis preservasi berupa *flipbook* digital, keduanya belum sepenuhnya difungsikan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kerja preservasi karena belum disosialisasikan secara menyeluruh dan belum diinstitutionalisasi ke dalam kebijakan resmi lembaga. Berdasarkan perspektif IFLA, BB Pustaka telah memiliki dasar kelembagaan dan kapasitas teknis yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek standardisasi prosedur, dokumentasi kebijakan, dan institutionalisasi pengetahuan

preservasi agar kegiatan pelestarian koleksi dapat berjalan lebih konsisten, sistematis, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh BB Pustaka maupun pihak terkait. Pertama, BB Pustaka perlu melakukan formalisasi dokumen teknis preservasi yang selama ini bersifat informal, termasuk *flipbook* digital penanganan koleksi antikuariat, ke dalam bentuk kebijakan atau SOP resmi yang ditetapkan secara kelembagaan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan teknis preservasi tidak hanya tersimpan pada individu tertentu, tetapi menjadi bagian dari sistem organisasi yang dapat diakses dan diterapkan secara berkelanjutan oleh seluruh staf.

Kedua, sosialisasi dan pelatihan mengenai SOP preservasi yang telah ada perlu dilaksanakan secara terstruktur kepada seluruh pustakawan dan staf teknis yang terlibat dalam kegiatan preservasi. Hal ini bertujuan untuk

menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik kerja di lapangan sehingga standar preservasi dapat diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai strategi institusionalisasi *tacit knowledge* preservasi ke dalam sistem manajemen pengetahuan perpustakaan khusus pemerintah, serta mengeksplorasi model kebijakan preservasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi koleksi warisan budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adcock, E. P. (2000). *IFLA principles for the care and handling of library material*.
- Ariyanti, N. N., Pratama, B. A., & Rifauddin, M. (2025). Preservasi dan konservasi bahan pustaka cetak di perpustakaan universitas bojonegoro. *THE LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science*, 5(1), 21-31.
- Astrina, A. D., Khadijah, U. L. S., & Rizal, E. (2024). Kebijakan manajemen preservasi naskah Minangkabau di Museum Adityawarman sebagai upaya pelestarian budaya. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 4(2), 119-132.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dewandaru, D. A. K. (2023). Melestarikan Indigenous Knowledge (IK) Melalui Pengelolaan Koleksi Langka di Perpustakaan. *Media Informasi*, 32(2), 181– 189.
- Dila, B. A. (2020). Standard Operating Procedure Preservasi Koleksi di Perpustakaan (Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta). *Pustabilia: Journal of Library and Information Science*, 4(1), 111-128.
- Endriawan, B., & Chinthia, M. (2025). Peran Konservasi dan Preservasi Media Informasi Dalam Pelestarian Naskah Kuno: Strategi dan Tantangan: The Role of Information Media Conservation and Preservation in Preserving Ancient Manuscripts: Strategies and Challenges. *Library archive and tecnology journal*, 1(1), 24-36.
- Fatmawati, E. (2018). Identifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan koleksi perpustakaan. *EduLib*, 7(2).
- Ibrahim, A. (2016). *Pelestarian Bahan Pustaka*. UIN Alauddin Press.
- Lee, K. H., Slattery, O., Lu, R., Tang, X., & McCrary, V. (2002). The state of the art and practice in digital preservation. *Journal of research of the National institute of standards and technology*, 107(1), 93.

- Lolytasari, L. (2017). Pengelolaan Tacit Knowledge dan Explicit Knowledge Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Pustakaloka*, 9(2), 323-336.
- Martin, E. S. (2024). Kebijakan preservasi koleksi kearifan lokal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, 3(1), 98-105.
- Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks.
- Nuraini, D. (2017). *Konservasi buku antiquariat di Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA)* Bogor.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press Banjarmasin
- Safanawati, S. K., & Samson, C. M. S. (2020). Kegiatan alih media koleksi antiquariat di Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. *Nusantara Journal of Information and Library Studies (N-JILS)*, 3(1), 115-128.
<https://ojs.uninus.ac.id/JILS/article/download/807/592>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (2010).
- Yin, R. K. (2015). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.